BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan global pada era modern saat ini membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara individu mengelola keuangan pribadinya. Kondisi perekonomian yang terus berubah menyebabkan individu perlu memahami cara mengatur keuangan pribadinya dengan cermat agar mampu menyesuaikan diri dengan tekanan serta kebutuhan keuangan yang terus meningkat (Salwa et al., 2022). Selain itu, pergeseran gaya hidup masyarakat turut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang praktis, cepat, dan mudah diakses (Jannah et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai inklusi keuangan (Liska et al., 2022).

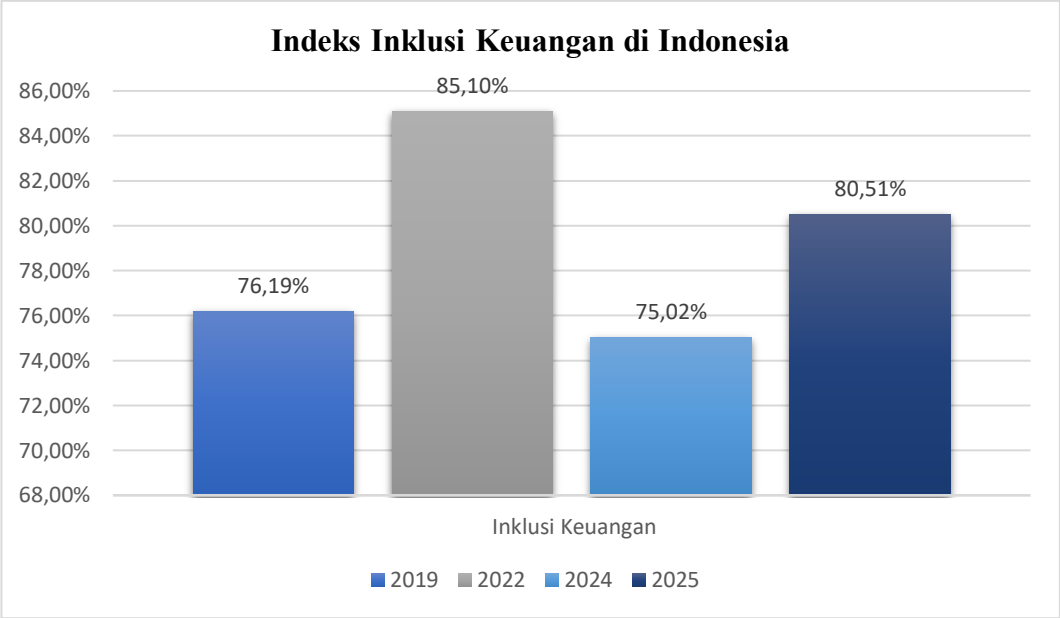
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, keterjangkauan dan pemerataan akses layanan keuangan menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan ekonomi global. Inklusi keuangan dipandang penting karena dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan formal secara lebih merata. *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPFI) menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi. Oleh karena itu, GPFI mendorong penyusunan Kerangka Kerja Inklusi Keuangan yang dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi setiap negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Murdiyati & Rizkita, 2025).

Komitmen global tersebut kemudian direspons oleh berbagai negara melalui upaya perluasan jangkauan layanan keuangan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas perekonomian nasional (Putri et al., 2024). Perluasan ini juga menjadi bentuk penyesuaian terhadap perubahan sosial serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tingkat inklusi keuangan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Singapura yang mencapai 97,55%, Thailand sebesar 95,58%, dan Malaysia sebesar 88,37% (Murdiyati & Rizkita, 2025).

Indonesia turut mengikuti perkembangan tersebut melalui penerapan berbagai kebijakan yang diwujudkan dengan penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 sebagai dasar penguatan kebijakan penyediaan layanan keuangan yang lebih merata. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) strategi ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarindividu maupun antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, program inklusi keuangan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan masyarakat dengan berbagai layanan keuangan formal. Pemerintah berupaya menghadirkan layanan keuangan yang beragam, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat untuk mendorong partisipasinya dalam aktivitas keuangan formal. Melalui perluasan akses tersebut, masyarakat diharapkan mampu mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik serta memperkuat posisi ekonominya (Damayanti & Budiwitjaksono, 2024).

Sejalan dengan upaya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal (Anggraini & Trisnaningsih, 2025). Tingkat inklusi keuangan mencerminkan kemampuan individu dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang aman, berkualitas, serta terjangkau. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya menggambarkan ketersediaan akses, tetapi juga menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan formal (Liska et al., 2022).



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2025)

Gambar 1.1 Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang belum stabil. Pada tahun 2019 tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 76,19%, kemudian meningkat menjadi 85,10% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 tingkat inklusi keuangan mengalami penurunan menjadi 75,02% sebelum kembali meningkat menjadi 80,51% pada tahun 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih mengalami perubahan berupa kenaikan dan penurunan pada beberapa periode. Selain itu, capaian tersebut juga masih berada di bawah target nasional sebesar 98% yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (OJK, 2025). Belum tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih lanjut (OJK, 2025).

Kondisi inklusi keuangan di tingkat nasional tersebut juga dapat dilihat pada tingkat regional, termasuk di wilayah 3 Cirebon yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Wilayah ini mengalami perkembangan di berbagai sektor yang turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Seiring

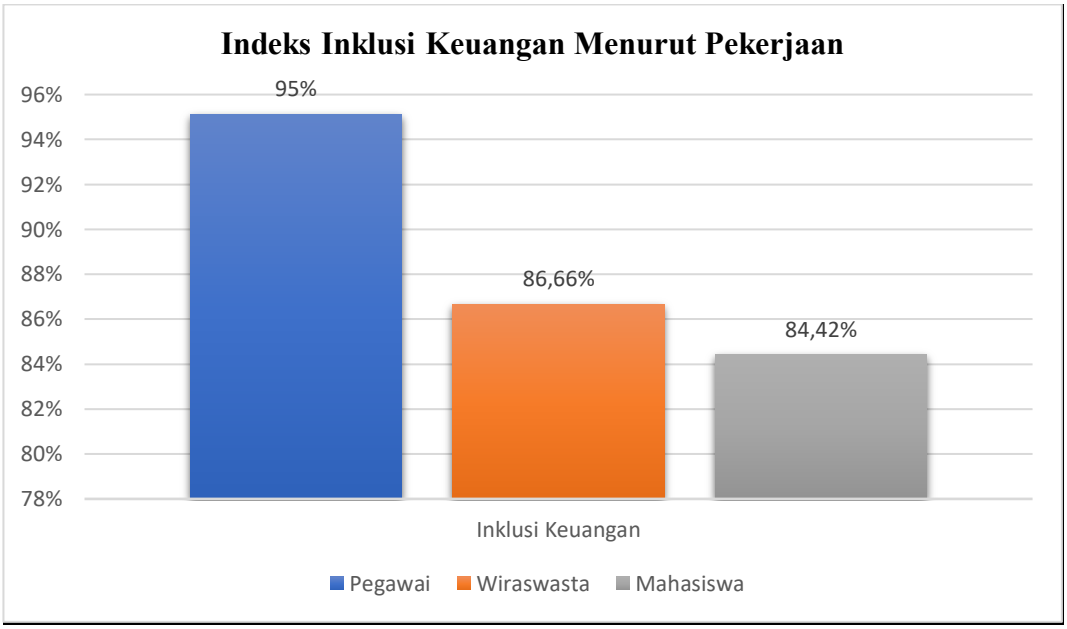
berkembangnya aktivitas ekonomi tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan juga semakin meningkat, baik untuk keperluan transaksi, menabung, maupun perencanaan keuangan jangka panjang (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2024). Oleh sebab itu, inklusi keuangan menjadi aspek yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan keuangan, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan mereka (Anggraini & Trisnaningsih, 2025).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan seharusnya diikuti dengan pemanfaatan layanan yang merata. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Wilayah 3 Cirebon. Pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Wilayah 3 Cirebon tercatat sebesar 79,19%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal (Indriyani, 2024). Dengan demikian, pemanfaatan layanan keuangan di wilayah tersebut masih belum merata.

Perbedaan perkembangan inklusi keuangan semakin terlihat ketika dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Sumedang berhasil memperoleh penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat Jawa-Bali atas keberhasilannya dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2026). Sementara itu, Kabupaten Kuningan masih terus didorong melalui berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemanfaatan layanan keuangan di Kabupaten Kuningan belum optimal sehingga masih memerlukan perhatian lebih lanjut (ANTARA News Jawa Barat, 2026).

Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada kelompok mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang sedang berada pada tahap menuju kemandirian keuangan. Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang disertai meningkatnya jumlah mahasiswa di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki peran dalam perkembangan ekonomi daerah. Mahasiswa berada pada fase dimana mulai dihadapkan pada berbagai kebutuhan keuangan pribadi sehingga dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara lebih baik (Wahyuni et al., 2025).

Seiring berkembangnya produk dan layanan keuangan, mahasiswa juga perlu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin dihadapi (Salwa et al., 2022). Kondisi tersebut menjadikan inklusi keuangan semakin penting bagi mahasiswa karena kemudahan akses terhadap layanan keuangan dapat membantu mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan keuangan. Selain itu, kedekatan mahasiswa dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat mendukung pemanfaatan layanan keuangan secara lebih optimal (Jannah et al., 2023).



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2025)

Gambar 1.2 Indeks Inklusi Keuangan Menurut Pekerjaan

Meskipun akses terhadap layanan keuangan semakin berkembang, pemanfaatannya di kalangan mahasiswa masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan mahasiswa masih tergolong lebih rendah dibandingkan beberapa kelompok pekerjaan lainnya (OJK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses yang tersedia belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan layanan keuangan formal.

Kondisi tersebut juga mulai mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program OJK Mengajar yang diselenggarakan di Universitas Kuningan. Program tersebut menjadi salah satu upaya dalam

meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan dan pemanfaatan layanan keuangan secara lebih bijak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan pada mahasiswa masih perlu terus dilakukan (OJK, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti melakukan pra-survei untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat inklusi keuangan mahasiswa di universitas yang berada di Kabupaten Kuningan dengan jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa. Pernyataan dalam pra-survei disusun berdasarkan indikator inklusi keuangan yang meliputi akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan (Zai et al., 2023). Adapun hasil pra-survei disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Pra-Survei Mengenai Inklusi Keuangan

Pernyataan	Jawaban Responden		Persentase Jawaban Responden		Total
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Saya memiliki rekening atas nama pribadi pada layanan keuangan formal.	27	3	90%	10%	30
Saya mengalami kesulitan dalam membuka rekening di lembaga keuangan formal.	16	14	53,3%	46,7%	30
Saya dapat menggunakan layanan keuangan formal kapan pun saya membutuhkannya.	23	7	76,7%	23,3%	30
Saya lebih sering menggunakan uang tunai dibandingkan menggunakan layanan keuangan non-tunai.	18	12	60%	40%	30
Saya pernah mengalami kendala saat menggunakan layanan keuangan formal.	22	8	73,3%	26,7%	30
Saya merasa aman menyimpan uang pada layanan keuangan formal.	15	15	50%	50%	30

Data diolah: Pra-Survei Penelitian (2025)

Berdasarkan data pra-survei pada Tabel 1.1 diperoleh jawaban responden yang menunjukkan bahwa pada item pertama sebagian besar mahasiswa menjawab “Ya” dengan persentase sebesar 90%, sementara yang menjawab “Tidak” sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki rekening atas

nama pribadi pada layanan keuangan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan rekening di kalangan mahasiswa sudah tinggi.

Pada item kedua, responden yang menjawab “Ya” sebesar 53,3% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam membuka rekening di lembaga keuangan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan pada tahap awal akses layanan keuangan formal di kalangan mahasiswa.

Pada item ketiga, sebagian besar mahasiswa menjawab “Ya” dengan persentase sebesar 76,7%, sementara yang menjawab “Tidak” sebesar 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dapat menggunakan layanan keuangan formal kapan pun mereka membutuhkannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan keuangan formal cukup mudah diakses dalam mendukung kebutuhan keuangan mahasiswa.

Pada item keempat, sebagian besar mahasiswa menjawab “Ya” dengan persentase sebesar 60%, sementara yang menjawab “Tidak” sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih sering menggunakan uang tunai dibandingkan menggunakan layanan keuangan non-tunai dalam bertransaksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan keuangan di kalangan mahasiswa belum sepenuhnya optimal.

Pada item kelima, sebagian besar mahasiswa menjawab “Ya” dengan persentase sebesar 73,3%, sementara yang menjawab “Tidak” sebesar 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa pernah mengalami kendala saat menggunakan layanan keuangan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan dalam penggunaan layanan keuangan formal di kalangan mahasiswa.

Pada item keenam, jawaban responden menunjukkan persentase yang sama, yaitu 50% menjawab “Ya” dan 50% menjawab “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa merasa aman dalam menyimpan uang pada layanan keuangan formal, sedangkan sebagian lainnya belum merasa demikian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan mahasiswa terhadap layanan keuangan formal masih belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, hasil pra-survei menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki akses yang cukup baik terhadap layanan keuangan formal, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal yang terlihat dari masih adanya kendala dalam penggunaan layanan keuangan formal serta rasa aman yang belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Hal ini sejalan dengan fenomena yang menggambarkan bahwa kemudahan akses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan secara maksimal di kalangan mahasiswa, sehingga inklusi keuangan pada mahasiswa di universitas yang berada di Kabupaten Kuningan masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan pada mahasiswa di universitas yang berada di Kabupaten Kuningan.

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan (Fitriah & Ichwanudin, 2020). Menurut Lusardi (dalam Ariefin et al., 2023) literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu dalam mengelola keuangannya dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Albeerdy dan Gharledghi (dalam Novita et al., 2022) menjelaskan bahwa kemampuan tersebut memberikan manfaat bagi individu, seperti memahami konsep pengelolaan keuangan, fungsi lembaga keuangan, serta tanggung jawab dalam mengelola keuangan pribadi, sehingga literasi keuangan menjadi dasar penting bagi individu untuk dapat menggunakan layanan keuangan secara tepat dan efektif sesuai kebutuhannya.

Literasi keuangan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan karena membantu individu memahami cara mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan (Ariefin et al., 2023). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki individu maka semakin baik pula kemampuannya dalam mengambil keputusan serta mengelola keuangan secara efektif (Salwa et al., 2022). Melihat pentingnya peran literasi keuangan, kemampuan ini juga perlu dimiliki oleh mahasiswa yang aktif berinteraksi dengan berbagai layanan keuangan, khususnya yang berbasis digital.

Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan dan penggunaan uang, mahasiswa dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan

keuangan, sehingga mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara lebih optimal (Lantara & Kartini, 2015). Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh (Liska et al., 2022; Putri et al., 2024; Apriliani & Yudiaatmaja, 2023; Ainiyah & Yuliana, 2022; Kerthayasa & Darmayanti, 2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jannah et al., 2023; Angraenia et al., 2024; Chikmah & Karsono, 2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Menurut Trevio Julian Djakaria et al., (2023) faktor yang juga dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah *financial technology*. *Financial technology* berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan hadir untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi serta pembiayaan secara lebih mudah. Inovasi ini merupakan bentuk adaptasi industri jasa keuangan terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (dalam Salwa et al., 2022) menyatakan bahwa keberadaan *financial technology* dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, serta mempermudah proses transaksi. Selain itu, beragam inovasi *financial technology* seperti pembayaran digital, *e-wallet, mobile banking*, pinjaman *online*, dan layanan investasi, kini semakin banyak digunakan oleh generasi muda khususnya mahasiswa (Salsabella & Handri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa *financial technology* sudah menjadi bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari mahasiswa.

Dengan semakin luasnya penggunaan layanan tersebut, mahasiswa perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai agar dapat memanfaatkan platform *financial technology* dengan lebih bijak serta memahami risiko yang dapat ditimbulkan. Dalam penelitian (Liska et al., 2022; Apriliani & Yudiaatmaja, 2023; Ainiyah & Yuliana, 2022; Diwangsa & Sari, 2024; Pamungkas & Setyani, 2024) menyatakan bahwa *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Sementara itu, pada penelitian (Wewengkang et al.,

2021; Sari & Kautsar, 2020) menyatakan bahwa *financial technology* tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Selain itu, menurut Kusuma (2020) faktor yang juga dapat mempengaruhi inklusi keuangan adalah *financial self-efficacy*. Menurut Sari dan Anam (dalam Pamungkas & Setyani, 2024) *financial self-efficacy* atau efikasi diri pada keuangan merupakan kemampuan individu dalam membangun rasa percaya diri untuk menggunakan layanan keuangan yang tersedia guna meningkatkan kualitas hidupnya. Individu dengan tingkat *financial self-efficacy* yang baik, umumnya memiliki keyakinan lebih tinggi dalam berinteraksi dengan berbagai layanan keuangan.

Kepercayaan diri inilah yang mendorong individu untuk merasa mampu mengambil keputusan serta melakukan tindakan yang berkaitan dengan aktivitas keuangannya. Keyakinan dalam mengelola keuangan akan meningkatkan kemungkinan individu untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia. Dengan demikian, semakin baik tingkat *financial self-efficacy* yang dimiliki individu, maka tingkat inklusi keuangan di masyarakat juga akan semakin meningkat (Mindra et al., 2017).

Babatunde (dalam Anggraini & Trisnaningsih, 2025) menyatakan bahwa keyakinan diri dalam mengelola keuangan menjadi hal yang penting bagi individu dalam memanfaatkan layanan keuangan. Mahasiswa sebagai kelompok yang telah terbiasa menggunakan berbagai layanan keuangan formal juga perlu memiliki keyakinan terhadap kemampuannya dalam mengelola keuangan pribadi. Hal tersebut penting mengingat mahasiswa berada pada masa transisi menuju kemandirian keuangan, sehingga diperlukan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat. Pada penelitian (Damayanti & Budiwitjaksono, 2024; Anggraini & Trisnaningsih, 2025; Pamungkas & Setyani, 2024) mengungkapkan bahwa *financial self-efficacy* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah et al., 2021; Muslichah et al., 2023) yang menyatakan bahwa *financial self-efficacy* tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas mengenai inklusi keuangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Literasi**

Keuangan, *Financial Technology* dan *Financial Self-Efficacy* Terhadap Inklusi Keuangan (Survei Pada Mahasiswa di Universitas yang Berada di Kabupaten Kuningan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan?
2. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan?
3. Bagaimana pengaruh *financial self-efficacy* terhadap inklusi keuangan?
4. Apakah literasi keuangan, *financial technology* dan *financial self-efficacy* berpengaruh terhadap inklusi keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial self-efficacy* terhadap inklusi keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan, *financial technology* dan *financial self-efficacy* berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut diantaranya manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan manajemen keuangan, khususnya dalam memperluas pengetahuan mengenai pengaruh literasi keuangan, *financial technology* dan *financial self-efficacy* terhadap inklusi keuangan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan pada

mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan serta pengembangan program literasi serta inklusi keuangan yang lebih efektif.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, seperti literasi keuangan, *financial technology*, dan *financial self-efficacy*. Dengan adanya pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara lebih bijak, tepat, dan bertanggung jawab dalam mendukung pengelolaan keuangan pribadi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan pengalaman dan pemahaman yang berkaitan dengan literasi keuangan, *financial technology* dan *financial self-efficacy* terhadap inklusi keuangan sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian berikutnya.